

**PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENDORONG GOOD GOVERNANCE DI NEGARA BERKEMBANG: STUDI LITERATUR**

**Adam Ali Muhammad Al bantani<sup>1</sup>, Afrizal Eka Prasetya<sup>2</sup>, Alya Eprili Suhendar<sup>3</sup>,  
Halfi Nisa Ahsani Pratiwi<sup>4</sup>, Mochamad Rustu Ferdiwan<sup>5</sup>, Jaliludin Muslim<sup>6</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [ali09.adam@gmail.com](mailto:ali09.adam@gmail.com)<sup>1</sup>, [afrizaleka777@gmail.com](mailto:afrizaleka777@gmail.com)<sup>2</sup>, [alyaeprili567@gmail.com](mailto:alyaeprili567@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[halfipratiwi.work@gmail.com](mailto:halfipratiwi.work@gmail.com)<sup>4</sup>, [mrferdiwan123@gmail.com](mailto:mrferdiwan123@gmail.com)<sup>5</sup>, [jaliludin@uinsgd.ac.id](mailto:jaliludin@uinsgd.ac.id)<sup>6</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi internasional dalam mendorong penerapan good governance di negara berkembang melalui pendekatan studi literatur. Permasalahan utama yang diangkat adalah masih lemahnya tata kelola pemerintahan di negara berkembang, yang ditandai dengan rendahnya transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kajian literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi internasional seperti World Bank dan United Nations Development Programme memiliki peran signifikan melalui bantuan teknis, finansial, transfer norma global, serta monitoring dan evaluasi kebijakan. Intervensi tersebut terbukti mampu meningkatkan transparansi, reformasi birokrasi, serta penguatan institusi di beberapa negara berkembang. Namun demikian, implementasi good governance tidak selalu berjalan optimal karena adanya hambatan seperti ketidaksesuaian dengan konteks lokal, rendahnya kapasitas institusi, serta faktor politik domestik. Selain itu, terdapat kritik terkait ketergantungan negara berkembang terhadap bantuan eksternal dan dominasi kepentingan global dalam agenda tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan agar peran organisasi internasional dapat memberikan dampak yang lebih efektif dalam mendorong good governance.

Kata Kunci: Good governance, organisasi internasional, negara berkembang, transparansi, akuntabilitas

**Abstract**

This study aims to analyze the role of international organizations in promoting good governance in developing countries through a literature review approach. The main issue addressed is the persistent weakness of governance systems in developing countries, characterized by low levels of transparency, accountability, and bureaucratic effectiveness. This research employs a qualitative method by reviewing relevant academic literature. The findings indicate that international organizations such as the World Bank and the United Nations Development Programme play a significant role through technical and financial assistance, global norm diffusion, as well as policy monitoring and evaluation. These interventions have contributed to improvements in transparency, bureaucratic reform, and institutional strengthening in several developing countries. However, the implementation of good governance is not always optimal due to challenges such as incompatibility with local contexts, limited institutional capacity, and domestic political dynamics. Additionally, criticisms arise regarding dependency on external

assistance and the dominance of global interests in governance agendas. Therefore, a more contextual, adaptive, and sustainable approach is needed to enhance the effectiveness of international organizations in promoting good governance.

Keywords: Good governance, international organizations, developing countries, transparency, accountability

## **PENDAHULUAN**

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan pilar utama dalam mempercepat pembangunan nasional di negara berkembang. Kalau kita lihat realitas di lapangan, banyak negara berkembang yang justru masih berkebutakan dengan masalah birokrasi menahun yang tidak kunjung selesai. Masalah yang paling kelihatan adalah lemahnya transparansi informasi publik, di mana masyarakat sering kali kesulitan memantau bagaimana anggaran dan kebijakan itu dibuat. Hal ini otomatis berdampak pada rendahnya akuntabilitas para pembuat kebijakan, sehingga tidak ada tanggung jawab yang jelas ketika terjadi penyimpangan. Ujung dari semua tumpukan masalah ini adalah birokrasi yang tidak efektif mulai dari pelayanan publik yang lambat dan berbelit-belit, sampai kultur kerja instansi yang masih kaku. Berbagai kendala struktural tersebut bukan lagi sekadar masalah administrasi biasa, melainkan ancaman nyata yang bisa menggagalkan agenda pembangunan nasional secara jangka panjang. Oleh karena itu, krisis tata kelola ini menjadi sebuah masalah besar yang sangat mendesak dan penting untuk kita teliti lebih dalam.

Di tengah beratnya tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam menata administrasinya, hadirilah dorongan masif dari aktor eksternal seperti World Bank dan UNDP. Apabila ditelaah lebih dalam, kedua organisasi ini sebenarnya membawa orientasi yang cukup kontras dalam menyebarkan prinsip good governance. Lembaga donor seperti World Bank meletakkan fokus instrumennya pada tata kelola ekonomi untuk memastikan kepastian investasi serta administrasi negara yang bersih dari korupsi. Sebaliknya, UNDP menawarkan perspektif yang lebih luas dengan memfokuskan programnya pada penguatan sistem pemerintahan yang demokratis serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Masuknya intervensi global ini baik dalam restrukturisasi manajemen maupun penguatan demokrasi menunjukkan bahwa krisis tata kelola lokal kini bukan lagi sekadar urusan domestik, melainkan telah ditarik menjadi sebuah agenda pemenuhan standar global yang diatur oleh lembaga internasional.

Menelaah hambatan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan sangatlah penting. Hal ini karena kualitas birokrasi berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat Kraipornsak (2023) Masalah ini juga perlu menjadi perhatian publik karena kegagalan program dari lembaga donor bisa menyebabkan pemborosan dana bantuan dan memperburuk pelayanan publik Marini (2023). Di sinilah letak celah penelitian yang mendasari studi ini. Kajian-kajian sebelumnya masih sangat terbatas karena hanya melihat angka keberhasilan akhir dari suatu program. Belum ada ulasan menyeluruh yang merangkum seberapa efektif sebenarnya peran World Bank dan UNDP beroperasi di negara berkembang, terutama ketika aturan internasional mereka berbenturan dengan hambatan budaya lokal di lapangan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi yang sederhana namun penting, yaitu melengkapi sudut pandang dokumen resmi dengan rangkuman pengalaman nyata negara-negara berkembang yang tercatat di berbagai penelitian. Analisis ini tidak hanya melihat laporan keberhasilan di atas kertas, tetapi juga menyoroti bagaimana dinamika negosiasi antara agenda global dan kearifan lokal di lapangan. Melalui sudut pandang ini, tulisan ini berupaya memetakan bagaimana mekanisme World Bank dan UNDP beroperasi di negara berkembang, serta mengidentifikasi apa saja hambatan sosiokultural yang membuat proses adaptasi tersebut tidak selalu berjalan mulus. Pada akhirnya, rangkaian ulasan tersebut diharapkan dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan utuh untuk mengukur seberapa efektif bantuan teknis yang diberikan dalam mendorong transparansi birokrasi. Melalui alur analisis yang disusun secara sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan evaluasi bagi organisasi internasional dalam merancang program bantuan ke depan, serta menjadi acuan bagi pemerintah negara berkembang dalam menyesuaikan agenda donor agar tetap selaras dengan kebutuhan nasional.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Good Governance**

Teori good governance merujuk pada prinsip pengelolaan pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta supremasi hukum dalam proses pengambilan kebijakan publik (Bank, 1992). Konsep ini muncul sebagai respon terhadap kegagalan model pemerintahan tradisional yang cenderung tertutup dan tidak efisien. Dalam perspektif ini, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor, melainkan bekerja bersama masyarakat sipil dan sektor swasta. Good governance juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian, tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Indikator: (1) Transparansi dalam pengelolaan informasi publik (2) Akuntabilitas lembaga pemerintahan (3) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan (4) Efektivitas dan efisiensi birokrasi (5) Penegakan supremasi hukum.

### **Teori Peran Organisasi Internasional**

Teori peran organisasi internasional menjelaskan bagaimana lembaga global berfungsi sebagai aktor penting dalam memengaruhi kebijakan domestik suatu negara melalui bantuan teknis, finansial, maupun normatif (Keohane, 1984). Organisasi internasional tidak hanya bertindak sebagai fasilitator kerja sama, tetapi juga sebagai penyebar norma dan standar global. Dalam konteks negara berkembang, intervensi ini sering kali diwujudkan dalam bentuk program reformasi kelembagaan dan pembangunan kapasitas birokrasi. Selain itu, organisasi internasional juga berperan sebagai pengawas dan evaluator terhadap implementasi kebijakan yang didukungnya. Dengan demikian, keberadaan organisasi internasional dapat memperkuat atau bahkan mengubah arah kebijakan nasional.

Indikator: (1) Bantuan teknis dan finansial (2) Transfer norma dan standar global (3) Pengaruh terhadap kebijakan domestik (4) Fungsi monitoring dan evaluasi (5) Intensitas keterlibatan dalam program reformasi.

### **Teori Institusionalisme (New Institutionalism)**

Teori institusionalisme baru (new institutionalism) menekankan bahwa perilaku aktor dalam suatu sistem politik sangat dipengaruhi oleh norma, aturan, dan struktur institusi yang ada (North, 1990). Institusi tidak hanya dipahami sebagai organisasi formal, tetapi juga mencakup nilai, budaya, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian antara aturan formal dan praktik sosial di lapangan. Dalam konteks negara berkembang, sering terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan yang diadopsi dari luar dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, faktor sosiokultural menjadi elemen penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan.

Indikator; (1) Kesesuaian antara aturan formal dan praktik lokal (2) Pengaruh norma dan budaya terhadap kebijakan (3) Stabilitas dan konsistensi institusi (4) Adaptasi kebijakan terhadap konteks lokal (5) Tingkat kepatuhan aktor terhadap aturan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara good governance, peran organisasi internasional, dan dinamika institusional dalam konteks negara berkembang. Penelitian oleh (Grindle, 2004) menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance sering menghadapi kendala kapasitas institusional dan kondisi politik domestik, sehingga reformasi tidak selalu berjalan optimal.

Penelitian Dani Rodrik (2008) menegaskan bahwa tidak terdapat satu model tata kelola yang bersifat universal, karena setiap negara memiliki karakteristik institusional yang berbeda. Kebijakan yang diadopsi dari luar cenderung gagal apabila tidak disesuaikan dengan konteks lokal.

Dalam konteks organisasi internasional, (Keohane & Nye, 2001) menjelaskan bahwa pengaruh organisasi internasional terhadap kebijakan domestik berlangsung melalui mekanisme penyebaran norma (soft power), yang keberhasilannya bergantung pada penerimaan domestik.

Studi (Bank, 2003) menunjukkan bahwa reformasi sektor publik yang didukung organisasi internasional lebih efektif apabila disertai partisipasi masyarakat dan komitmen politik pemerintah. Sebaliknya, pendekatan top-down cenderung kurang berhasil.

Sementara itu, (North, 1990) menekankan bahwa perubahan institusional yang efektif harus selaras dengan norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Keterkaitan antara teori good governance, teori peran organisasi internasional, dan teori institusionalisme baru dapat dipahami sebagai suatu kerangka analisis yang saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika tata kelola di negara berkembang. Teori good governance menyediakan standar normatif mengenai bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan secara transparan, akuntabel, dan efektif. Sementara itu, teori peran organisasi internasional menjelaskan bagaimana aktor eksternal seperti World Bank dan United Nations Development Programme mendorong penerapan standar tersebut melalui intervensi kebijakan, bantuan teknis, dan transfer norma global. Di sisi lain, teori institusionalisme baru memberikan penjelasan kontekstual mengenai mengapa implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak selalu berjalan optimal, terutama karena adanya pengaruh norma lokal, budaya birokrasi, dan struktur institusi yang telah mengakar. Dengan demikian, ketiga teori ini membentuk suatu hubungan analitis yang utuh, di mana standar global, mekanisme penyebaran, dan konteks lokal saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan reformasi tata kelola pemerintahan.

Dalam penelitian ini, teori good governance digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai sejauh mana kebijakan yang didorong oleh organisasi internasional mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di negara berkembang. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dijadikan sebagai indikator evaluatif terhadap implementasi kebijakan yang dihasilkan dari intervensi aktor eksternal. Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya berfokus pada keberhasilan formal suatu program, tetapi juga menilai kualitas proses dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan menjadikan good governance sebagai kerangka evaluasi, penelitian ini dapat mengidentifikasi kesenjangan antara standar normatif yang diusung oleh lembaga internasional dan realitas implementasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, teori ini berfungsi sebagai alat ukur yang sistematis dalam menilai efektivitas kebijakan sekaligus sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang lebih kontekstual.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review), yang dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi teoritis dan empiris yang relevan dengan peran organisasi internasional dalam mendorong good governance di negara berkembang. Studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang diteliti.

Menurut Creswell dalam (Habsy et al., 2023), studi literatur merupakan rangkuman tertulis yang memuat berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang digunakan untuk mendefinisikan konsep serta memberikan gambaran mengenai perkembangan suatu topik penelitian. Metode studi literatur digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data dan sumber yang terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan kemudian memberikan penjelasan serta pemahaman atas fakta tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, berbagai literatur tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk peran organisasi internasional, seperti bantuan teknis, bantuan finansial, advokasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi, serta kaitannya dengan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Peran Organisasi Internasional dalam Mendorong Good Governance**

Berdasarkan hasil analisis literatur, organisasi internasional memiliki peran strategis dalam mendorong penerapan good governance di negara berkembang melalui berbagai bentuk intervensi yang bersifat teknis, normatif, dan struktural. Dalam konteks global, organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bantuan, tetapi juga sebagai fasilitator kerja sama multilateral serta aktor yang membentuk kerangka kebijakan tata kelola pemerintahan (Budiana, 2024). Selain itu, organisasi internasional juga menjadi wadah kerja sama antarnegara dalam mencapai tujuan bersama, termasuk dalam bidang pembangunan dan tata kelola pemerintahan (Judita et al., 2022). Organisasi internasional memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong penerapan good governance di negara berkembang melalui berbagai pendekatan yang bersifat multidimensional

Dalam praktiknya, salah satu bentuk peran utama yang dilakukan adalah melalui pemberian bantuan teknis dan penguatan kapasitas kelembagaan. Lembaga seperti UNDP dan World Bank diketahui berperan dalam meningkatkan kapasitas institusi melalui program pelatihan serta penguatan sistem administrasi publik (Handayani & Nur, 2019). Dukungan ini juga mencakup penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas melalui berbagai program capacity building (Timothy & Richard, 2025). Hasilnya, berbagai penelitian menunjukkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik sebagai bagian dari reformasi tata kelola .

Selain bantuan teknis, organisasi internasional juga berperan dalam membentuk dan menyebarkan standar kebijakan global terkait good governance. Lembaga internasional menempatkan agenda tata kelola sebagai prioritas utama dalam kebijakan bantuan mereka, sehingga negara berkembang cenderung mengadopsi prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas (Timothy & Richard, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa organisasi internasional berperan sebagai norm setter dalam tata kelola pemerintahan global. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsep good governance yang diperkenalkan oleh lembaga internasional tidak selalu sesuai dengan kondisi sosial dan politik di negara berkembang, sehingga implementasinya sering menghadapi berbagai tantangan (Rivai & Bastari, 2019). Perbedaan kondisi politik, sosial, dan kelembagaan di masing-masing negara menyebabkan implementasi kebijakan tidak selalu berjalan optimal.

## **Dampak Terhadap Good Governance**

Dampak terhadap good governance dalam konteks peran organisasi internasional di negara berkembang dapat dilihat dari peningkatan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Organisasi seperti World Bank dan United Nations Development Programme secara aktif mendorong keterbukaan informasi publik melalui program reformasi administrasi, digitalisasi layanan, serta penerapan prinsip akuntabilitas. Transparansi ini diwujudkan melalui penyediaan akses data publik, pelaporan kinerja pemerintah, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Dengan adanya standar global yang dibawa oleh organisasi tersebut, pemerintah terdorong untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan meminimalisir praktik penyimpangan (Kabagambe, 2019).

Lebih jauh, transparansi yang diperkuat oleh organisasi internasional juga mendorong partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Melalui inisiatif seperti open government dan e-governance, masyarakat diberikan ruang untuk mengakses informasi sekaligus memberikan umpan balik terhadap kebijakan publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi pemerintah, tetapi juga menciptakan mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap kinerja birokrasi. United Nations menekankan bahwa transparansi dan partisipasi publik merupakan pilar utama dalam membangun tata kelola yang demokratis dan inklusif (Putting the Environment at the Heart of People ' s Lives, n.d.).

Selain aspek transparansi, organisasi internasional juga berperan penting dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Melalui bantuan teknis, pelatihan kapasitas, serta pendampingan kebijakan, lembaga seperti Organisation for Economic Co-operation and Development dan International Monetary Fund membantu negara berkembang dalam merancang sistem birokrasi yang modern dan berbasis kinerja. Reformasi ini mencakup penyederhanaan prosedur administrasi, pengurangan birokrasi yang berbelit, serta penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (Change, 2018)

Reformasi birokrasi tersebut juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya standar operasional yang lebih jelas dan sistem evaluasi berbasis kinerja, instansi pemerintah mampu memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep New Public Management yang menekankan efisiensi dan orientasi hasil dalam sektor publik. World Bank menyebutkan bahwa reformasi birokrasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah.

Di sisi lain, kontribusi organisasi internasional juga terlihat dalam penguatan institusi pemerintahan di negara berkembang. Penguatan ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penyusunan regulasi yang lebih adaptif, serta penguatan sistem pengawasan. United Nations Development Programme menekankan pentingnya capacity building sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa institusi publik mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Penguatan institusi juga mencakup peningkatan integritas dan upaya pemberantasan korupsi. Lembaga seperti Transparency International berperan dalam menyediakan indikator global seperti Corruption Perceptions Index yang menjadi acuan bagi negara berkembang dalam mengevaluasi kinerja tata kelola mereka. Indeks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai tekanan moral dan politik bagi pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan anti-korupsi (Transparency International, 2022)

Selain itu, organisasi internasional turut mendorong terciptanya kolaborasi lintas sektor dalam penguatan institusi. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil difasilitasi melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat sinergi antar aktor dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Organisation for Economic Co-operation and Development menekankan bahwa kolaborasi multi-aktor merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola yang efektif.

Secara keseluruhan, peran organisasi internasional dalam mendorong good governance di negara berkembang tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup transformasi nilai dan budaya organisasi pemerintahan. Melalui peningkatan transparansi, reformasi birokrasi, serta penguatan institusi, negara berkembang didorong untuk mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara berkelanjutan. Dengan demikian, intervensi organisasi internasional menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat (Muttaqien, 2023).

### **Perbandingan Temuan Penelitian**

Dalam kajian literatur mengenai peran organisasi internasional dalam mendorong good governance di negara berkembang, terdapat sejumlah temuan yang menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan. Intervensi yang dilakukan oleh lembaga seperti World Bank dan United Nations Development Programme terbukti mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kapasitas kelembagaan melalui program reformasi administrasi dan penguatan tata kelola.

Keberhasilan ini umumnya terlihat pada negara yang memiliki stabilitas politik dan komitmen reformasi yang tinggi, sehingga mampu mengadopsi standar internasional secara konsisten dalam sistem pemerintahan mereka (Report, 2021).

Keberhasilan juga tercermin dari peningkatan kualitas manajemen keuangan publik dan pengawasan anggaran. Berbagai program yang didukung oleh International Monetary Fund mendorong negara berkembang untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini berdampak pada peningkatan kredibilitas fiskal serta kepercayaan investor internasional terhadap negara tersebut. IMF (2021) mencatat bahwa reformasi fiskal yang didukung oleh organisasi internasional mampu mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik.

Keberhasilan lain juga terlihat pada aspek reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Organisation for Economic Co-operation and Development melalui berbagai rekomendasi kebijakan mendorong penerapan sistem merit, digitalisasi layanan, serta evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur. Studi OECD (2018) menunjukkan bahwa negara berkembang yang mengadopsi praktik administrasi modern mengalami peningkatan signifikan dalam efektivitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

Keberhasilan implementasi good governance juga diperkuat oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Program-program yang didukung oleh United Nations mendorong penerapan prinsip inklusivitas dan partisipasi publik melalui mekanisme konsultasi, transparansi data, serta penguatan peran masyarakat sipil. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih demokratis antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat legitimasi kebijakan publik (Nations, 2019). Namun demikian, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang positif. Sejumlah studi juga mengungkap adanya keterbatasan dalam implementasi kebijakan yang didorong oleh organisasi internasional. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian antara model kebijakan global dengan kondisi lokal di negara berkembang. United Nations Development Programme menekankan bahwa perbedaan konteks sosial, budaya, dan politik sering kali menyebabkan kebijakan yang diadopsi tidak berjalan secara optimal di tingkat implementasi.

Keterbatasan lainnya berkaitan dengan rendahnya kapasitas institusi dan sumber daya manusia. Banyak negara berkembang masih menghadapi masalah dalam hal kompetensi aparatur, koordinasi antar lembaga, serta sistem administrasi yang belum terintegrasi. Transparency International mencatat bahwa lemahnya integritas birokrasi dan masih tingginya

tingkat korupsi menjadi penghambat utama dalam mewujudkan good governance secara efektif. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sering kali bersifat simbolik atau administratif semata. Kebijakan yang diadopsi dari standar internasional tidak selalu diikuti dengan perubahan nyata dalam praktik pemerintahan. Fenomena ini dikenal sebagai isomorphic mimicry, di mana negara hanya meniru bentuk kelembagaan tanpa menginternalisasi fungsi sebenarnya. World Bank mengidentifikasi bahwa kondisi ini banyak terjadi di negara berkembang yang memiliki tekanan eksternal tinggi tetapi kapasitas internal rendah.

Keterbatasan lain yang cukup krusial adalah adanya ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Ketergantungan ini dapat mengurangi kemandirian negara dalam merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan domestik. International Monetary Fund dalam beberapa kajiannya menunjukkan bahwa ketergantungan pada bantuan teknis dan finansial dapat memperlambat proses pembangunan kapasitas internal jika tidak diimbangi dengan strategi keberlanjutan. faktor politik domestik juga sering menjadi penghambat dalam implementasi good governance. Pergantian kepemimpinan, konflik kepentingan, serta lemahnya komitmen elite politik dapat menghambat keberlanjutan reformasi yang telah dirancang. Organisation for Economic Co-operation and Development menegaskan bahwa keberhasilan reformasi sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik dan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang (OECD Economic Outlook, 2020).

Secara keseluruhan, perbandingan temuan penelitian menunjukkan bahwa peran organisasi internasional dalam mendorong good governance bersifat kompleks dan tidak selalu linear. Di satu sisi, intervensi mereka mampu meningkatkan kualitas tata kelola melalui reformasi kelembagaan, transparansi, dan efisiensi. Namun di sisi lain, berbagai keterbatasan seperti rendahnya kapasitas internal, ketidaksesuaian konteks lokal, serta dinamika politik domestik menjadi tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berbasis kebutuhan lokal agar kontribusi organisasi internasional dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi negara berkembang.

### **Keterbatasan dan Kritik**

Pembahasan mengenai peran organisasi internasional seperti World Bank, International Monetary Fund, dan United Nations dalam mendorong good governance di negara berkembang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kritik yang bersifat struktural maupun normatif.

#### **a. Ketergantungan Negara Berkembang**

Salah satu kritik utama adalah munculnya ketergantungan struktural negara berkembang terhadap bantuan, pendanaan, dan rekomendasi kebijakan dari organisasi internasional. Bantuan yang diberikan sering kali disertai dengan persyaratan tertentu (conditionalities), yang pada akhirnya membentuk arah kebijakan domestik.

Dalam perspektif kritis, kondisi ini tidak hanya menciptakan ketergantungan ekonomi, tetapi juga ketergantungan kebijakan (policy dependency). Negara berkembang menjadi kurang mandiri dalam merumuskan strategi governance yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Menurut pandangan saya, situasi ini berpotensi menghambat inovasi kebijakan domestik karena negara cenderung mengikuti “template” global daripada mengembangkan pendekatan kontekstual.

#### b. Intervensi Kepentingan Global

Kritik berikutnya berkaitan dengan intervensi kepentingan global dalam agenda good governance. Organisasi internasional tidak sepenuhnya netral, melainkan berada dalam struktur kekuasaan global yang sering didominasi oleh negara maju.

Kebijakan yang didorong oleh lembaga seperti International Monetary Fund dan World Bank kerap mencerminkan kepentingan ekonomi global, seperti liberalisasi pasar dan integrasi ekonomi internasional. Dalam praktiknya, agenda tersebut tidak selalu selaras dengan prioritas pembangunan nasional negara berkembang.

Secara kritis, saya melihat bahwa konsep good governance dalam konteks ini kadang berfungsi sebagai instrumen legitimasi untuk mendorong agenda global tertentu, bukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

#### c. Tidak Semua Program Efektif

Meskipun berbagai program reformasi governance telah dijalankan, efektivitasnya sering kali dipertanyakan. Banyak program yang berfokus pada reformasi administrative seperti peningkatan transparansi atau pembentukan lembaga anti-korupsi namun tidak menghasilkan perubahan substantif dalam praktik pemerintahan.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi. Dalam banyak kasus, reformasi hanya terjadi di tingkat formal (institusional), sementara praktik informal seperti patronase politik dan korupsi tetap berlangsung.

Dalam pandangan saya, kegagalan ini disebabkan oleh pendekatan yang terlalu teknokratis dan kurang mempertimbangkan faktor politik, budaya, serta relasi kekuasaan yang kompleks di negara berkembang. Dengan kata lain, solusi yang ditawarkan sering kali tidak menyentuh akar permasalahan.

## **Gap Penelitian**

Meskipun kajian mengenai peran organisasi internasional dalam mendorong good governance di negara berkembang telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat celah penelitian yang signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Salah satu gap utama terletak pada dominasi pendekatan makro dan komparatif lintas negara yang cenderung menggeneralisasi temuan tanpa mempertimbangkan kompleksitas konteks lokal. Banyak penelitian masih berfokus pada indikator global dan analisis statistik agregat, sehingga kurang mampu menangkap dinamika implementasi kebijakan di tingkat nasional maupun subnasional. Padahal, praktik good governance sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti budaya politik, kapasitas institusi, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam pandangan saya, kekurangan pendekatan kontekstual ini menyebabkan rekomendasi kebijakan sering kali bersifat normatif dan kurang aplikatif di lapangan. Selain itu, terdapat keterbatasan yang cukup mencolok dalam penelitian jangka panjang (longitudinal studies) yang mampu menilai keberlanjutan dampak intervensi organisasi internasional. Sebagian besar studi masih berfokus pada hasil jangka pendek, seperti perubahan indikator governance dalam periode tertentu, tanpa mengkaji apakah perubahan tersebut bersifat struktural atau hanya sementara. Hal ini menjadi persoalan penting karena reformasi governance pada dasarnya merupakan proses yang kompleks dan memerlukan waktu panjang untuk menghasilkan transformasi yang nyata. Dalam konteks ini, penelitian terbaru seperti yang dikemukakan oleh Hidayatullah, (2026) menunjukkan bahwa adopsi prinsip good governance oleh negara sering kali bersifat strategis dan tidak selalu diikuti oleh implementasi substantif, sehingga menegaskan pentingnya evaluasi jangka panjang yang lebih mendalam. Lebih lanjut, gap penelitian juga terlihat pada keterbatasan perspektif yang digunakan, di mana literatur masih didominasi oleh pendekatan dan kerangka teoritis dari negara maju. Dominasi ini berimplikasi pada terbentuknya bias epistemologis yang cenderung mengabaikan pengalaman, praktik lokal, dan pengetahuan yang berasal dari negara berkembang itu sendiri. Dalam pandangan saya, kondisi ini menyebabkan kajian good governance sering kali tidak sepenuhnya merepresentasikan realitas yang terjadi di lapangan, melainkan lebih mencerminkan standar normatif global yang belum tentu relevan secara kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat perspektif Global South dalam penelitian agar menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif dan berimbang.

Di samping itu, masih terdapat kekurangan dalam kajian yang menyoroiti peran aktor non-negara dan dinamika di tingkat lokal. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada negara dan organisasi internasional sebagai aktor utama, sementara peran masyarakat sipil, organisasi lokal, dan komunitas sering kali terabaikan. Padahal, aktor-aktor ini memiliki kontribusi penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kurangnya perhatian terhadap level mikro ini menyebabkan analisis menjadi kurang komprehensif dalam menjelaskan bagaimana good governance nya dijalankan dalam praktik sehari-hari.

Terakhir, perkembangan isu kontemporer seperti digital governance dan transformasi teknologi juga belum banyak diintegrasikan dalam kajian tentang peran organisasi internasional. Padahal, kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat serta membuka peluang baru dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, penelitian yang mengkaji keterkaitan antara organisasi internasional, good governance, dan digitalisasi masih relatif terbatas. Dalam pandangan saya, gap ini menjadi peluang penting bagi penelitian di masa depan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih relevan dengan tantangan global yang terus berkembang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional memiliki peran penting dalam mendorong penerapan good governance di negara berkembang melalui berbagai bentuk intervensi, seperti bantuan teknis, dukungan finansial, serta penyebaran norma dan standar global. Peran tersebut terbukti mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas birokrasi, serta penguatan institusi pemerintahan.

Namun demikian, efektivitas intervensi tersebut tidak bersifat universal dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal masing-masing negara. Ketidaksesuaian antara kebijakan global dan konteks sosiokultural, rendahnya kapasitas institusi, serta dinamika politik domestik menjadi hambatan utama dalam implementasi good governance. Selain itu, ketergantungan terhadap bantuan eksternal dan adanya kepentingan global juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance. Kolaborasi antara organisasi

internasional, pemerintah, dan masyarakat lokal menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan nasional.

## REFERENSI

- Bank, W. (1992). *Governance and Development*. World Bank.
- Bank, W. (2003). *World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People*. World Bank.
- Budiana, M. (2024). Global Governance: The Role of International Institutions in the 21st Century. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 1(2), 204–219.
- Change, U. N. C. (2018). UN CLIMATE CHANGE.
- Grindle, M. S. (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. *Governance*, 17(4), 525–548.
- Habsy, B. A., Mufidha, N., & Shelomita, C. (2023). Filsafat Dasar dalam Konseling Psikoanalisis : Studi literatur. 7(2). <https://doi.org/10.30653/001.202372.266>
- Handayani, A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. 11(1), 1–11.
- Hidayatullah, I. (2026). Analisis Komparatif Implementasi Good Governance di Indonesia dan Singapura.
- Judita, K. D., Karno, U. B., Ganesha, U. P., & Governance, G. (2022). PENTINGNYA ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM SUATU NEGARA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN HUBUNGAN BAIK ANTARNEGARA DI INDONESIA. 10(1), 509–517.
- Kabagambe, A. (2019). *Annual Report 2019 Africa Group I*.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2001). *Power and Interdependence* (3rd ed.). Longman.
- Kraipornsak, U. (2023). Pengaruh akuntabilitas sebagai asas good governance. *Bappenas Working Papers*, 6(1).
- Marini, R. (2023). Implikasi penerapan good governance terhadap pembangunan. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 7(2).
- Muttaqien, M. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi*, VOLUME VI,(I), 51–64.
- Nations, U. (2019). *Department of Economic and Social Affairs*. United Nations.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- OECD Economic Outlook (Issue December). (2020).
- putting the environment at the heart of people ' s lives. (n.d.).

- Report, A. (2021). UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Development never stops .
- Rivai, A. N. A., & Bastari, G. R. (2019). Paradoks penerapan good governance di indonesia: suatu tinjauan kritis mp3ei. 7(2).
- Timothy, O., & Richard, K. (2025). Assessing The Role Of International Organisations Towards The Development Of The Third World Countries: A Case Study Of UNDP In Uganda. Metropolitan Journal Of Social And Educational Research, 4(5), 661–678.
- Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index. Transparency International.